

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PEMBATALAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SECARA SEPIHAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 118/PDT.G/2024/PN SBY)**

Oleh:

Nahfa Khoivina Humairo

E1A021097

ABSTRAK

Sifat mengikatnya kesepakatan perdamaian tidak menjamin kesempurnaan dalam pelaksanaannya sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/Pn Sby, dimana terjadi perbuatan melawan hukum karena pembatalan sepihak oleh Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti rugi atas pembatalan kesepakatan perdamaian secara sepihak. Jenis penelitian yuridis normatif. Menggabungkan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian preskriptif analisis bersumber dari data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif dengan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hakim tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Pembatalan sepihak Tergugat memenuhi tiga kriteria yaitu melanggar hak kebendaan Penggugat, melanggar Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara dan melanggar kepatutan karena dilandasi itikad buruk. Hakim dalam menentukan ganti rugi tidak melakukan perhitungan berdasarkan ketentuan tertentu dan menganggap kerugian Penggugat sebagai akibat logis dari perbuatan melawan hukum Tergugat. Perbuatan Tergugat memenuhi syarat ganti rugi dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesengajaan Tergugat melakukan pembatalan, kerugian Penggugat berupa biaya peralihan aset dan uang, serta pembatalan sepihak Tergugat secara langsung mengakibatkan Penggugat terhambat melaksanakan kewajibannya. Hakim menghukum Tergugat untuk kembali melaksanakan peralihan aset dan menerima pembayaran uang sebagaimana isi kesepakatan perdamaian.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Sepihak, Kesepakatan Perdamaian, Ganti Rugi

JURIDICAL ANALYSIS OF TORT AGAINST THE UNILATERAL CANCELLATION OF A PEACE AGREEMENT

(STUDY OF DECISION NUMBER 118 /PDT.G /2024 /PN SBY)

By:

Nahfa Khoivina Humairo

E1A021097

ABSTRACT

A peace agreement's binding nature doesn't guarantee flawless implementation, as shown by Decision Number 118/Pdt.G/2024/Pn Sby, where a Tort occurred due to the Defendant's unilateral cancellation of the agreement. This study aims to examine the judicial reasoning in qualifying the tort and assessing compensation resulting from the cancellation. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study relies on secondary data from literature, presented in narrative text form through qualitative normative analysis. The findings reveal that the judge didn't elaborate on the tort criteria. The unilateral cancellation satisfies three criteria. Violation of Plaintiff's property rights, breach of Article 1266(2) of the Indonesian Civil Code, and conduct contrary to propriety due to bad faith. In awarding compensation, the judge did not apply specific statutory formulas but treated the Plaintiff's losses as a logical consequence of the Defendant's tort. The Defendant's actions meet the elements of Article 1365 of the Civil Code: existence of tort, intent to cancel, the Plaintiff's losses including asset transfer costs and money, and direct causal link preventing the Plaintiff from fulfilling its obligations. The judge ordered the Defendant to proceed the asset transfer and accept the payment as agreed in peace agreement.

Keywords: Tort, Unilateral Cancellation, Peace Agreement, Compensation